

ABSTRAK

Penambangan merupakan suatu kegiatan yang dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup. Dengan adanya otonomi daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki kewenangan untuk membuat Perda Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 sebagai upaya dalam mengendalikan kegiatan pertambangan di wilayah sungai. Maraknya pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Bojonegoro sangat memprihatinkan karena menimbulkan kerusakan pada lingkungan sehingga perlu dilakukan penegakan hukum untuk meminimalisir dampak pertambangan pasir ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro.

Di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke objeknya yaitu masyarakat untuk mendalami kepastian hukum yang ada dan dijalani di dalam masyarakat secara nyata yang merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memakai pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian secara empiris mendapatkan pemahaman hukum serta menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Dari data yang diperoleh menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur di dalam masyarakat Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai dengan perda yang telah dibuat karena pelaku usaha pertambangan pasir tidak melakukan izin yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Berbagai upaya penegakan hukum juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menurunkan angka pertambangan pasir ilegal namun masih berjalan tidak efektif.

Kata Kunci : Pertambangan-ilegal-izin-implementasi-penegakan hukum

ABSTRACT

Mining is an activity that can have an impact on the environment. With regional autonomy, the Regional Government of East Java Province has the authority to make East Java Regional Regulation Number 1 of 2005 as an effort to control mining activities in river areas. The rise of illegal sand mining in Bojonegoro Regency is very concerning because it causes damage to the environment so it is necessary to enforce the law to minimize the impact of illegal sand mining. This study aims to identify and analyze the implementation of East Java Provincial Regulations in Bojonegoro Regency.

In this research, it is carried out by going directly to the object, namely the community to explore legal certainty that exists and is carried out in real society which is an empirical juridical research. This study uses a sociological juridical research approach that emphasizes empirical research to gain an understanding of the law and uses data collection techniques, namely observation, interviews and literature study. From the data obtained using primary and secondary data which is then analyzed using a qualitative descriptive method.

The results in this study indicate that the implementation of the East Java Provincial Regulations in the Bojonegoro Regency community is not in accordance with the regulations that have been made because the sand mining business actors do not carry out the permits that have been regulated in the East Java Provincial Regulations. Various law enforcement efforts have also been carried out by the Bojonegoro Regency Government to reduce the number of illegal sand mining but are still running ineffectively.

Keywords: Mining-illegal-permit-implementation-law enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian	9
1.6.3 Lokasi dan Responden	9
1.6.4 Sumber Data.....	12
1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	14
1.6.6 Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DAN TEORI PENELITIAN.....	18

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penambangan Pasir Ilegal.....	18
2.2 Teori Penelitian	26
2.2.1 Teori Implementasi	26
2.2.2 Teori Penegakan Hukum.....	28
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN PENAMBANGAN PASIR ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005.....	34
3.1 Pembahasan.....	34
3.1.1 Pembahasan Tentang Pertambangan Pasir.....	34
3.1.2 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penambangan Pasir Ilegal di Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	57
3.1.3 Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Bojonegoro.....	73
3.2 Hasil Penelitian	82
BAB IV PENUTUP.....	88
4.1 Kesimpulan	88
4.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	93